

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PSBB DAN PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 PADA BIDANG USAHA
PARIWISATA RESTORAN CAFE DI KOTA BANJARBARU**

Septiana Delimasari¹, Agus Jalpi², Erwin Ernadi³

¹Prodi Kesehatan Masyarakat, 13021, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNISKA
MAB Banjarmasin, 18070127

²Prodi Kesehatan Masyarakat, 13021, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNISKA
MAB Banjarmasin, 1102088502

³Prodi Kesehatan Masyarakat, 13021, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNISKA
MAB Banjarmasin, 1101029001

*Email : septianads21@gmail.com

ABSTRACT

The PSBB policy and the Covid-19 Health Protocol are rules that must be obeyed by all tourism service businesses. This policy can help reduce the number of positive cases of the COVID-19 virus in Banjarbaru City. Although it is undeniable for tourism business actors, the covid-19 case and the policies issued have a significant impact on the economy. This study aims to identify the influence of PSBB policy and health protocol on the tourism business sector of cafe restaurants in Banjarbaru City. This research is a field research using qualitative descriptive methods, data sources from primary and secondary data. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The results of the study explained that every applicable policy always provides two things, namely results and impacts, as well as what happens with the implementation of the PSBB policy and the Covid-19 health protocol. The PSBB policy has made café restaurant business actors experience a slump in terms of income. Seeing this, of course, the government does not close its eyes, various efforts continue to be made, one of which is by creating a new normal so that business actors slowly experience a revival. In this way, it is hoped that it will be a balance between health and the economy during the pandemic.

Keywords : *Influence, PSBB, Health Protocols, Restaurant Café*

ABSTRAK

Kebijakan PSBB dan Protokol Kesehatan Covid-19 merupakan sebuah aturan yang harus di taati oleh seluruh usaha jasa pariwisata. Kebijakan tersebut dapat membantu menekan angka kasus positif virus covid-19 di Kota Banjarbaru. Meskipun tidak dapat dipungkiri bagi pelaku usaha pariwisata kasus covid-19 beserta kebijakan-kebijakan yang diterbitkan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terkait pengaruh Kebijakan PSBB dan Protokol Kesehatan pada Bidang Usaha Pariwisata Restoran Cafe yang ada di Kota Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap

kebijakan yang berlaku selalu memberikan dua hal, yakni hasil dan dampak, begitupun yang terjadi dengan pemberlakuan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan covid-19. Kebijakan PSBB membuat pelaku usaha restoran café mengalami keterpurukan dari segi pendapatan. Melihat hal ini tentu pemerintah tidak tutup mata, berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya dengan menciptakan *new normal* sehingga para pelaku usaha secara perlahan mengalami kebangkitan. Dengan cara ini diharapkan akan menjadi keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian dimasa pandemi.

Kata Kunci : Pengaruh, PSBB, Protokol Kesehatan, Restoran Café

PENDAHULUAN

Menurut WHO (2020), Coronavirus telah menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan maupun manusia. Manusia yang terjangkit virus ini akan menunjukkan gejala-gejala penyakit infeksi saluran pernafasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* atau sindrom pernafasan akut berat. Coronavirus sendiri merupakan virus jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*.

Berdasarkan data dari website resmi Kementerian Kesehatan (2022), prevalensi kasus covid-19 yang melanda dunia hingga tanggal 13 April 2022 mencapai 499.119.316 kasus konfirmasi, untuk kasus sembuh yakni sekitar 492.934.074 kasus, 6.185.242 kasus meninggal, persen angka kematian 1,2% dari jumlah kasus konfirmasi. Jumlah kasus konfirmasi untuk Regional Asia Tenggara 57.478.119 kasus, 56.696.797 kasus sembuh dan 781.322 untuk kasus meninggal, persen angka kematian yakni 1,4%. Di Indonesia

sendiri prevalensi kasus mencapai 6.036.909 kasus konfirmasi, 5.814.688 kasus sembuh, dan 155.746 kasus meninggal, serta masih terdapat kasus aktif sekitar 1,1% yakni 66.475 kasus.

Di Indonesia, secara garis besar pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kasus positif covid-19 baru. Adapun yang menjadi berbagai upaya yang diberlakukan Pemerintah terbagi menjadi tiga dalam hal kesehatan yaitu promotif (upaya mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan meningkatkan imunitas), Preventif (membentuk gugus tugas khusus penanganan covid-19 dan memberlakukan karantina wilayah), dan Kuratif (karantina pasien maupun isolasi mandiri dan pemberian obat). Selain itu, dalam hal ekonomi pemerintah juga memberlakukan jaring pengaman sosial (bantuan sosial) untuk membantu masyarakat Indonesia dalam melewati masa krisis ekonomi akibat adanya wabah covid-19 (Wahidah, et all, 2020).

Menurut Al-Fatih dan Felinda (2021) setiap orang memiliki hak atas kesehatan dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak itu. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah yaitu melalui upaya pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan merupakan bagian dari

perlindungan, seperti menciptakan lingkungan yang sehat dengan memberikan penyemprotan disinfektan di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Sedangkan untuk upaya penyembuhan bisa dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan yang optimal. Segala upaya yang dilakukan Pemerintah bertujuan supaya masyarakat Indonesia tidak terlalu khawatir dan panik dalam menghadapi wabah virus covid-19 ini. Perlindungan kesehatan masyarakat termasuk dalam hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga betapa pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.

Kebijakan Pemerintah untuk menerapkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mencegah semakin meluasnya penularan covid-19 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Sementara itu, mengenai detail teknis dan syarat-syarat terkait PSBB dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapula dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Sejak konferensi pers tanggal 2 Maret 2020 yang mengumumkan adanya kasus pertama positif virus covid-19 pada WNI, kemudian diterbitkannya kebijakan dari Kementerian Kesehatan RI dengan nomor HK.01.07/MENKES/304/2020 tentang Penetapan PSBB untuk

wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola, dan Kota Banjarbaru. Keputusan Kemenkes RI tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Banjarbaru dengan dibuatnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang "Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)", dimana Peraturan ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PSBB di Kota Banjarbaru, mulai dari aturan-aturan pelaksanaan, hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama masa PSBB, sumber daya penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19), pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sumber pendanaan dan sanksi yang dapat diberikan. Kemudian, perwali tersebut ditindaklanjuti lagi oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata untuk memberikan imbauan kepada seluruh pengelola destinasi wisata, pemilik usaha jasa penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan umum, maupun tempat-tempat olahraga untuk tutup sementara sampai batas waktu yang ditentukan.

Dengan adanya kebijakan dan imbauan ini, pelaku usaha dibidang pariwisata merasa memasuki pintu gerbang menuju kemerosotan ekonomi. Dimana kebijakan tersebut membuat pemiliknya merasa menanggung beban banyak orang, karena pengeluaran seperti pembayaran gaji pegawai, pembayaran pajak, dll, tetap harus dibayarkan sementara usahanya tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Sebenarnya, tidak hanya memberikan dampak pada perekonomian, juga

pada kehidupan sosial dan wabah ini merubah tatanan kehidupan masyarakat (Hasil observasi awal 14 April 2022).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Saniya (2021) pendekatan fenomenologi merupakan penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan dari data informasi atau solusi permasalahan melalui pengalaman yang terjadi pada tiap individu.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena ketika berbicara masalah dampak atau pengaruh dari sebuah kebijakan akan lebih tersampaikan pembahasannya jika dengan sebuah deskripsi. Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi adalah untuk mengidentifikasi implikasi kebijakan PSBB dan protokol kesehatan covid-19 pada bidang usaha pariwisata yaitu restoran cafe di Kota Banjarbaru.

Metode pengumpulan data yaitu dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan para informan yang usaha restoran café nya melewati masa-masa PSBB dan penerapan protokol kesehatan (era *new normal*) serta informan yang terlibat langsung dengan pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Restoran Café di Kota Banjarbaru

Perkembangan restoran café di Kota Banjarbaru mulai terasa pesat setelah Kota Banjarbaru

menjadi kota administratif. Didukung pula dengan banyaknya keberadaan perguruan tinggi di Kota Banjarbaru membuat Kota Banjarbaru dipenuhi dengan anak muda pendatang yang tujuannya adalah untuk menimba ilmu. Dengan melihat kebiasaan anak muda yang suka berkumpul, baik untuk mengerjakan tugas, acara komunitas, atau untuk sekedar *refreshing* inilah yang menjadi pendukung dari pesatnya perkembangan café.

B. Pelaksanaan Penerapan Kebijakan PSBB dan Protokol Kesehatan di Kota Banjarbaru

Penerapan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan covid-19 di Kota Banjarbaru dimulai dari meliburkan institusi pendidikan, memberlakukan sistem kerja *work from home*, hingga penutupan operasional usaha jasa pariwisata. Berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Walikota Banjarbaru mengenai pelaksanaan PSBB, yang mana selanjutnya kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru melalui Kepala Bidang Pariwisata dengan mengeluarkan surat edaran sekaligus imbauan kepada pelaku usaha untuk mematuhi kebijakan yang terurai dalam point-point perwali mengenai pelaksanaan PSBB.

Anggota satuan gugus tugas yang terdiri dari gabungan beberapa unit satuan kerja perangkat daerah membentuk posko penjagaan di beberapa titik yang berpotensi adanya keramaian seperti pasar, mall, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pelaksanaan penerapan kebijakan pemerintah selama pandemi (PSBB dan protokol kesehatan covid-19) terus dimonitoring dan evaluasi secara berkala. Setiap restoran café diwajibkan untuk membatasi jumlah kunjungan, menyediakan tempat cuci tangan/wastafel, *handsanitizer*, dan termogan.

Dalam penerapan kebijakan tersebut tentunya tidak berjalan mulus begitu saja, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari pelaku usaha yang terus mengajukan dispensasi kebijakan hingga pelanggaran terhadap kebijakan. Pelanggaran yang terjadi umumnya seperti pelanggaran terhadap batasan jam operasional usaha (saat PPKM), namun ada pula pelanggaran berupa tetap beroperasi disaat PSBB, untuk pelanggaran seperti ini biasanya diberikan sanksi mulai dari pemberian surat teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan izin operasional dan penyegehan tempat usaha (ditutup). Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh petugas patroli gabungan dimasa PSBB, jika café tersebut menimbulkan kerumunan maka petugas mengambil tindakan untuk melakukan swab ditempat terhadap pengunjung café tersebut.

C. Efektivitas Kebijakan PSBB dan Protokol Kesehatan dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Kota Banjarbaru

Efektif atau tidaknya kebijakan PSBB dan protokol kesehatan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Jika kita

melihatnya dari sektor kesehatan, kebijakan PSBB terkait dengan penutupan tempat dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan kerumunan, dimana kerumunan bisa menjadi klaster penyebaran virus covid-19, maka kebijakan tersebut sudah tepat. Karena, ditengah kerumunan kita akan sulit menjaga jarak dengan orang lain dan tidak semua orang menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Kalau dilihat dari durasi pelaksanaannya, PSBB di Kota Banjarbaru hanya berlaku selama 13 hari, jika tidak terjadi pelandaian angka kasus, PSBB di Kota Banjarbaru pasti akan berlanjut ke jilid berikutnya seperti daerah disekitarnya, hal ini menandakan kebijakan PSBB dapat dikatakan efektif dalam upaya penanganan pandemi di Kota Banjarbaru.

Di sektor lainnya, dengan adanya pembatasan sosial berskala besar tidak dapat dielakkan bahwa kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi. Dalam hal ini terjadilah ketimpangan, yang mana seharusnya kesehatan dan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan. Untuk mencegah supaya ekonomi tidak terus mengalami keterpurukan oleh sebab itu pemerintah mengambil langkah menciptakan “era *new normal*”.

D. Pengaruh Kebijakan PSBB Pada Bidang Usaha Pariwisata Restoran Café di Kota Banjarbaru

PSBB merupakan pilihan tersulit bagi usaha restoran café saat harus diterapkan. Pelaksanaan

PSBB memberikan potensi pengaruh tidak langsung berupa penurunan omzet restoran café.

Mewabahnya virus covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk *stay at home* agar dapat memutus rantai penyebaran covid membuat restoran café yang sedang memulai eksistensinya menjadi dilema, pelaku usaha tidak mungkin bisa bertahan dan mengalah jika operasional usahanya harus terus dibatasi. Meskipun masih bisa take away dengan memanfaatkan media online, namun pada saat pandemi, semua masyarakat merasakan krisis ekonomi yang mengakibatkan daya beli juga menurun.

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya perkembangan restoran café di Kota Banjarbaru memberikan kontribusi nyata untuk menggerakkan roda perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dimana untuk Kota Banjarbaru sendiri yang tidak memiliki kekayaan alam seperti daerah lain, hanya bergerak di bidang jasa, membuat hasil pendapatan asli daerah bergantung pada pajak dan retribusi, maka dengan adanya kebijakan yang membuat terbatasnya operasional pelaku usaha memberikan penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan.

E. Pengaruh Kebijakan Protokol Kesehatan Pada Bidang Usaha Pariwisata Restoran Café di Kota Banjarbaru

Memasuki masa new normal meskipun masih ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat,

dapat terlihat bahwa daya beli masyarakat mulai meningkat. Pelaku usaha sudah bisa memberlakukan dine in dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, terutama mengenai jaga jarak. Para pelaku usaha sudah mengatur sedemikian rupa agar tempat usahanya tidak menimbulkan kerumunan. Pelaku usaha menyatakan, mengalami peningkatan pendapatan, namun belum bisa disamakan dengan sebelum adanya pandemi covid-19.

Setiap kebijakan yang berlaku selalu memberikan dua hal, yaitu hasil dan dampak. Dalam hal ini, pemerintah tidak tutup mata dengan dampak yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang berlaku. Pemerintah terus melakukan upaya promotif dan preventif baik melalui sosialisasi, patroli gabungan untuk kontrol kebijakan, dan mendorong pelaksanaan program vaksinasi.

Dinas Porabudpar sendiri turut menyelenggarakan program vaksinasi di salah satu destinasi di Kota Banjarbaru, yakni Kampung Purun, dimana targetnya adalah para pelaku usaha, masyarakat sekitar dan masyarakat umum. Tujuan dari penyelenggaraan vaksinasi tersebut untuk menyiapkan agar masyarakat dapat berdaptasi dengan virus covid-19 saat memasuki masa new normal. Dengan melakukan self protect, baik itu vaksinasi dan taat prokes, masyarakat dapat beraktifitas kembali dengan aman. Pemerintah dan masyarakat berharap masa new normal adalah masa yang

dapat dimanfaatkan untuk pemulihan baik di sektor kesehatan, ekonomi, juga pendidikan. Karena di masa ini pembatasan yang berlaku tidak seketat semasa PSBB.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penerapan Kebijakan

Pelaksanaan penerapan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan covid-19 di Kota Banjarbaru dilaksanakan sebagaimana perwali yang berlaku. Pemerintah juga terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Mulai dari pengawasan, pemberian teguran, hingga pemberian sanksi juga dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Terkait dengan efektivitasnya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Karena efektivitas bersifat multi-tafsir. Jika melihatnya dari segi kesehatan, tentu dikatakan tepat sasaran atau efektif. Namun, jika kita melihat dampak yang dihasilkan, yang juga tidak kalah pengaruhnya dengan kesehatan bagi kelangsungan hidup masyarakat, bisa dikatakan kebijakan PSBB kurang tepat sehingga pemerintah mengambil langkah new normal untuk mengatasi keterpurukan yang dirasakan.

2. Pengaruh Kebijakan PSBB

Pengaruh kebijakan PSBB memberikan dampak tragis bagi pelaku usaha restoran cafe. Pendapatan pelaku usaha yang menurun juga akhirnya mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru. Terjadi penurunan sekitar 31,82% jika dilihat dari data realisasi pendapatan daerah.

3. Pengaruh Kebijakan Protokol Kesehatan

Memasuki masa new normal yang diharapkan oleh pemerintah sebagai masa pemulihan membuahkan hasil. Pelaku usaha merasakan ada kenaikan pendapatan dan kasus covid-19 di Kota Banjarbaru relatif stabil. Pendapatan yang dirasakan pelaku usaha tentu juga memberikan dampak pada pendapatan asli daerah, dimana terdapat kenaikan sekitar 20%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, saran yang dapat diberikan, sebagai berikut :

1. Bagi Pelaku Usaha Restoran Café

Pelaku usaha diharapkan terus melakukan inovasi untuk bisa bertahan ditengah pandemic dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ditempat usahanya.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan disamping menegakkan kebijakan yang berlaku, seperti adanya bantuan penyemprotan disinfektan ke tempat usaha,

- pemberian bantuan handsanitizer atau alat pengecekan suhu tubuh, dan lain sebagainya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan acuan bagi penelitian selanjutnya dan meneliti variabel lain seperti efektivitas, tingkat kepatuhan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatih, Sholahuddin & Felinda Istighfararisna. 2021. Tanggungjawab Negara Dalam Kasus Covid-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM. *Jurnal HAM*, 2: 3. Diakses pada 18 April 2022.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. *Peta Sebaran Transmisi Lokal dan Wilayah Terkonfirmasi*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>. Diakses: 18 April 2022.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*. <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses: 20 April 2022.
- Peraturan Presiden. 2020. *Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*. <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses: 18 April 2022.
- Peraturan Walikota Banjarbaru. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses: 18 April 2022.
- Saniya, Cintya Amira. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Pariwisata Kota Lama Semarang dalam Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Wahidah, Idah., dkk. 2020. Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *JMD: Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 11: 3. Diakses: 18 April 2022.
- World Health Organization. 2020. Coronavirus Disease (COVID-19). <https://covid19.who.int/>. Diakses: 18 April 2022.